

ABSTRAK

Dalam hal perlindungan hak asasi manusia, pekerja anak masih merupakan masalah besar. Ini terutama berlaku di negara berkembang seperti Indonesia, di mana anak-anak sering dipaksa bekerja dalam kondisi eksploitatif dan berbahaya sebagai akibat dari tekanan ekonomi, kurangnya akses ke pendidikan, dan kurangnya penegakan hukum. Skripsi ini membahas masalah pekerja anak dari sudut pandang instrumen hukum internasional. Fokus penelitian ini terletak pada Pasal 3 Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC), yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam semua keputusan yang berkaitan dengan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal, yaitu pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian hukum normatif dan realitas sosial, untuk menganalisis sejauh mana konvensi internasional seperti UNCRC dan Konvensi ILO No. 138 dan No. 182 telah diimplementasikan dalam kerangka hukum nasional Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan dan penegakan hukum, dan Implementasi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, terutama di sektor informal seperti pertanian dan pekerjaan domestik yang banyak melibatkan anak-anak dalam kondisi berbahaya. Skripsi ini menyoroti ketidakseimbangan regulasi antara hukum nasional dan hukum internasional dalam perlindungan pekerja anak, dan menekankan pentingnya revisi undang-undang ketenagakerjaan, penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran publik, serta koordinasi yang lebih efektif antar lembaga pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi peraturan nasional dengan standar internasional sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak anak dan penghapusan pekerja anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang tercantum dalam UNCRC.

Kata kunci: Pekerja Anak, UNCRC, Perlindungan Hukum, Indonesia.

ABSTRACT

Child labor is a significant human rights issue, particularly in developing countries such as Indonesia, where children are frequently forced to work in hazardous and exploitative conditions due to economic hardship, a lack of education, and lax legal enforcement. This thesis examines the issue of child labor through the perspective of international legal instruments, focusing primarily on the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), particularly Article 3, which states that the child's best interests must be the primary consideration in all actions involving them. This study takes a socio-legal approach, combining legal analysis with social realities, to investigate how international conventions such as the UNCRC and ILO Conventions Nos. 138 and 182 have been implemented within Indonesia's national legal framework, specifically Law No. 13 of 2003 on Manpower and Law No. 23 of 2002 on Child Protection. The findings show that, while Indonesia has ratified key international treaties, gaps in implementation and enforcement exist, particularly in the informal labor sector, such as agriculture and domestic work, where children are still exposed to dangerous conditions. This thesis exposes the regulatory disparity between national and international child labor regulations, emphasizing the need for Indonesia to update its labor laws, boost law enforcement, raise public awareness, and improve coordination among government agencies. The study indicates that harmonizing national rules with international norms is critical for protecting children's rights and eliminating child labor in accordance with the UNCRC's best interest concept.

Keywords: Child Labor, UNCRC, Legal Protection of Child.